

# Implementasi Pengelolaan Data Penduduk Berbasis Online Melalui Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Distrik Klamono Kabupaten Sorong

Asafita Patricia Klasjok Salossa<sup>1</sup>, Arie Purnomo<sup>2</sup>, Awal Fikri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong

Koresponden : awalfikri@um-sorong.ac.id

**ABSTRACT** : In the era of rapid globalization, digital access and technology integration are the keys to advancing a region, even in places far from the city center. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the Population Administration Information System in Klamono District, Sorong Regency, Southwest Papua. The Population Administration Information System (SIAK) is a system that manages population data by utilizing information and communication technology. SIAK includes population data collection and civil registration. The Klamono District Government implements the use of SIAK as one form of service approach to the community. SIAK is part of online-based governance that refers to the use of information technology to improve efficiency, transparency and accountability in governance. Thus, this section includes the provision of public services online. The SIAK implementation process in Klamono District has gone well as it should and received a positive response from the community who have benefited from it. However, of course there are still challenges that occur, for that, with various efforts that have been made, it is hoped that the existing challenges can be overcome.

**Keyword** : Implementation, Online-Based Population Administration Information System

**ABSTRAK** : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Di era globalisasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan penting, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat kota. SIAK merupakan sistem yang mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil secara digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIAK di Distrik Klamono telah berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan bagi aparatur, dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital. Secara keseluruhan, penerapan SIAK diharapkan dapat terus ditingkatkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.

**KATA KUNCI** : Implementasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

## PENDAHULUAN

Penerapan good governance dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia didasarkan pada amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Landasan hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Tata kelola pemerintahan merupakan suatu pandangan yang mengacu pada penyusunan regulasi yang kedepannya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan

aktivitas-aktivitas pemerintahan.

Ada juga beberapa definisi berbeda tentang tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Lembaga donor bilateral dan multilateral. Bank Dunia (1992) mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai: Suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah system peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah administrasi pemeritahan yang bertanggungjawab kepada publik (Lancaster, 1993). Tata Kelola pemerintahan yang baik berkaitan erat dengan manajemen pembangunan yang baik, hal ini sangat penting untuk membuat dan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata, serta ini juga merupakan suatu komponen penting untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik. (Hetifah Sj. Sumarto, 2009).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang tentunya efektif dan efisien maka sangat diperlukannya langkah-langkah yang mendorong percepatan pengelolaan pemerintahan, dalam hal ini adalah system yang digunakan untuk membantu terselenggaranya proses tata kelola pemerintahan. Tentunya pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin agar hal ini dapat berjalan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat.

Implementasi tata kelola pemerintahan berbasis online ini merupakan salah satu cara untuk menuju pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Ini juga merupakan bagian dari yang namanya *smart governance*, dimana setiap konsep maupun praktik tata kelola pemerintahan yang cerdas. Konsep ini menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengelola pemerintahan serta pelayanan publik secara efisien, cepat, responsif dan tentunya melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Implementasi tata kelola berbasis online ini tentunya membutuhkan perencanaan yang matang dan komprehensif dengan melibatkan aspek infrastruktur teknologi hingga perubahan budaya birokrasi.

Distrik Klamono adalah sebuah Distrik yang terletak di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Indonesia. Distrik ini merupakan tempat penghasil minyak terbesar diwilayah Papua Barat Daya. Secara administratif, Distrik Klamono berbatasan dengan Distrik Klayili di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Beraur. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Distrik Sayosa serta di sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Aimas dan Salawati. Keadaan Topografi desa/kampung di Distrik Klamono semua berada di wilayah dataran/daerah aliran sungai sebanyak 12 desa. Hal ini mengindikasikan bahwa desa-desa yang terdapat di Distrik Klamono merupakan Desa dataran/Daerah Aliran Sungai. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong, 2024).

Lokasi Distrik Klamono terbilang jauh dari pusat Kota Sorong yang penuh dengan keramaian. Namun ditengah-tengah keterbatasan yang dimiliki, pemerintah setempat sangat

mengusahakan berbagai hal untuk memajukan daerah mereka. Dalam hal pengelolaan pemerintahan juga berlaku demikian, berbagai upaya dilakukan agar dapat menghasilkan tatanan pemerintahan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Tuntutan reformasi birokrasi saat ini membawa teknologi informasi untuk ikut berperan serta dalam pemerintahan yang tentunya membutuhkan inovasi layanan public agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan berbasis online ini tentunya memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan. Pola perkembangan teknologi saat ini telah banyak mengubah paradigma individu, kelompok dan pemerintahan dalam bekerja. (Kelibay, 2020, p. 41).

Di era globalisasi yang berkembang pesat, akses digitalisasi dan integrasi teknologi menjadi kunci untuk memajukan sebuah wilayah bahkan ditempat yang jauh dari pusat kota. Namun tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, yang terkadang menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan mengelola data pemerintahan secara digitalisasi, sehingga penggunaan aplikasi atau sistem berbasis digital tidak dapat berjalan maksimal. Selain itu juga keterbatasan sumber daya manusia yang belum mumpuni untuk mampu bersaing dalam era teknologi. Secara keseluruhan tidak semua masyarakat distrik Klamono memiliki perangkat teknologi yang memadai untuk mengakses layanan pemerintahan berbasis digitalisasi. Hal ini juga merupakan kendala dalam memberikan layanan yang setara kepada semua lapisan masyarakat.

Faktor penghambat lainnya adalah resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital yang tak jarang mengalami penolakan, baik dari staff pemerintah distrik maupun masyarakat yang belum familiar dengan teknologi. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai manfaat dari sistem baru dapat memperlambat proses implementasi dan memperburuk ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Untuk itulah sebagai upaya agar pelayanan tata kelola pemerintahan di Distrik Klamono dapat berjalan efektif dan efisien, kebijakan yang bisa dilakukan oleh Kepala Distrik adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten Sorong. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Distrik Klamono, ia mengatakan bahwa pemerintah distrik menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong (Diskominfo) dengan mengikutsertakan 5 staffnya pada kegiatan pelatihan siaran TV Digital, ini merupakan investasi dalam sumber daya manusia yang mampu bersaing tapi juga langkah strategis untuk membawa Klamono kedalam era digitalisasi dengan memiliki tenaga terlatih dalam bidang siaran TV Digital.

Pemerintah Distrik Klamono dapat memanfaatkan media ini sebagai alat untuk mempromosikan potensi dan kekayaan lokal serta meningkatkan keterhubungan dan keterbukaan informasi diantara warganya, hal ini juga merupakan kesempatan untuk staff distrik

memperluas keterampilan mereka dalam dunia digital yang tentunya berguna untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan sehingga pintu menuju pemerintahan yang transparansi dan akuntabel mulai terbuka. Selain itu keikutsertaan beberapa staff distrik dan aparat kampung perwakilan 9 kampung untuk mengikuti Bimtek Aplikasi *Electronic Human Development Worker* (eHDW) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membantu pemetaan dan monitoring berbagai aspek pembangunan di desa. Hal ini sebagai salah satu cara untuk melatih SDM agar mampu mengoperasikan teknologi elektronik.

Bagian yang menjadi titik berat penelitian adalah Pemerintah Distrik Klamono melakukan kerjasama dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan nomor MoU 400.12-04 /011 /2024 Tentang Percepatan Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Program Kios Kampung bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sorong tentang Kios Kampung. Kios Kampung ini merupakan tempat pelayanan proses administrasi kependudukan di Distrik Klamono. Namun dalam pelayanannya juga melayani administrasi kependudukan dari beberapa distrik yang ada disekitar Distrik Klamono seperti Distrik Klasafet, Distrik Malabotom, Distrik Beraur. Ini merupakan langkah pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. SIAK ini merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. (Stefanus Arwandi Jai, Dody Setyawan, 2016, p. 35)

Adapun aplikasi yang terintegrasi dengan SIAK yaitu Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aplikasi IKD ini diatur dalam Permendagri Nomor 72 tahun 2022 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. IKD merupakan aplikasi resmi yang diberikan oleh negara sebagai identitas seseorang dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sedangkan SIAK terpusat merupakan sistem informasi yang memudahkan pengelolaan data kependudukan secara efisien dan akurat oleh instansi terkait. (Salsa Bella & Widodo, 2023, p. 16).

SIAK digunakan untuk mengelola data penduduk seperti KTP, KIA, cetak Kartu Keluarga, Akte

Kelahiran, Akte Nikah, Surat Pindah, dll. Cara ini lebih memudahkan proses pengurusan administrasi warga masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk pergi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di pusat Kabupaten Sorong. Proses pelayanan administrasi ini tersedia di Administrasi Kependudukan (Aminduk) Kios Kampung yang merupakan tempat khusus untuk melayani pelayanan administrasi kependudukan di Distrik Klamono.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang terfokus pada Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Distrik Klamono Kabupaten Sorong. Implementasi program ini akan ditinjau dengan menggunakan indikator kebijakan pemerintah, implementor serta manfaat yang diterima oleh ojek implementasi. Selanjutnya, penelitian ini juga akan melihat bagian-bagian mana yang perlu untuk dievaluasi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji fenomena sosial terkait implementasi pengelolaan data penduduk berbasis online melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, yang disajikan secara naratif. Menurut Sugiyono (2015), metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta menekankan pada makna dan interpretasi mendalam. Hal serupa ditegaskan oleh Marshall & Rossman (2006), dan Ledy & Ormrod (dalam Sarosa, 2012) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada konteks fenomena dan dilakukan secara menyeluruh.

Penelitian ini juga menekankan bahwa setiap fenomena memiliki keunikan masing-masing, sehingga dianalisis secara mendalam (Siyoto & Sodik, 2015). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai pandangan, sikap, dan kondisi masyarakat dalam konteks penerapan SIAK.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Implementasi Pengelolaan Data Penduduk Berbasis Online Melalui Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh pemerintah Distrik Klamono**

Pendekatan yang digunakan dalam mengamati proses implementasi pengelolaan data penduduk melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Distrik Klamono, yaitu pendekatan menurut William N. Dunn yang menitikberatkan pada kebijakan pemerintah, implementor, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat.

#### **1. Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah dalam penelitian ini, dapat dimaknai sebagai keinginan dari

pemerintah untuk membuat regulasi dalam pelaksanaan sebuah program dalam upaya merespon kebutuhan masyarakat dalam aspek pelayanan publik berupa administrasi kependudukan yang diselenggarakan melalui sistem online. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur tentang Administrasi Kependudukan ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, ini menjadi dasar dari semua proses administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah, kementerian terkait, pemerintah daerah, distrik hingga ke pemerintah desa atau kampung. Melihat dinamika atau perkembangan jaman dengan pelibatan serta pemanfaatan teknologi sebagai instrumen utama dalam pelayanan publik, disahkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 95 Tahun 2019. Permendagri ini mengatur tentang penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Kepala Distrik Klamono, Bapak Oktofianus Kolin, S.Pd.K yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, menyatakan bahwa :

Tata kelola pemerintahan berbasis online ini merupakan hal baru yang diterapkan pada pemerintahan Distrik Klamono dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun, saya terus mendorong staf distrik agar terus mengasah kemampuannya dan selalu belajar agar apa yang sedang kita terapkan ini dapat berjalan baik dan berdampak baik bagi masyarakat (Hasil wawancara, Oktofianus Kolin, 30 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut peneliti upaya yang dilakukan oleh pemerintah distrik ini merupakan bagian dari pada proses pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, agar pelayanan dapat efektif dan efisien. Disamping itu juga untuk mendukung jalannya tata kelola pemerintahan yang berbasis online, kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola juga telah dipersiapkan dengan baik. Semua ini menjadi bagian dari terselenggaranya pemerintahan yang baik. Implementasi pengelolaan data penduduk berbasis online melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Digital (SIAK) memiliki proses pengelolaan data penduduk yang dimulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah sebuah layanan berbasis digital yang berisi data kependudukan dan bisa diakses dengan menggunakan telepon genggam. Aplikasi ini terintegrasi melalui sebuah sistem terpusat yang dinamakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIAK mencakup pendataan penduduk dan pencatatan

sipil.

Aminduk Kios Kampung yang merupakan perpanjangan tangan Disdukcapil Kabupaten Sorong di Distrik Klamono yang melayani proses administrasi kependudukan, bisa mengelola aplikasi IKD melalui SIAK. Data yang dikelola pada aminduk Kios Kampung berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, Surat pindah antar provinsi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Distrik Klamono, bapak Handri Amike, SE pada 11 Februari 2025 menyatakan bahwa:

Pemerintah Distrik Klamono sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan data kependudukan. Pendelegasian sebagian kewenangan terkait dengan pendataan penduduk melalui aplikasi atau berbasis teknologi dari Disdukcapil ke Distrik, merupakan langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk lebih memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat oleh Distrik, dan lebih memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan mereka. (Hasil Wawancara, Handri Amike, SE, 11 Februari 2025)

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, menurut peneliti, kehadiran pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak sipil masyarakat. Terkhusus untuk pemerintah Distrik Klamono, penyelenggaraan pelayanan kependudukan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan layanan kependudukan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus ke Disdukcapil untuk memperoleh semua layanan ini karena sudah bisa dilayani di Distrik Klamono. Namun tidak hanya melayani masyarakat Distrik Klamono tetapi bisa melayani beberapa distrik disekitar Distrik Klamono.

## 2. Implementor

Menurut pada penjelasan tentang implementasi pengelolaan data penduduk berbasis online melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ini merupakan langkah terbaik yang dilakukan oleh pemerintah distrik dalam rangka percepatan pembangunan terkhususnya peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama salah satu Operator Layanan, Ibu Misriana yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025 menyatakan bahwa:

Dalam proses pengelolaan data penduduk di Aminduk Kios Kampung tentunya memiliki beberapa tahapan, kita ambil contoh pembuatan KTP Digital, yaitu : 1)

Memiliki handphone android yang sudah memuat aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), 2) Kemudian isi data diri pada kolom yang disediakan di aplikasi IKD (seperti Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, email pribadi) pada bagian ini pengguna diminta datang ke tempat layanan administrasi kependudukan (Aminduk Kios Kampung) untuk diverifikasi keakuratan datanya melalui sistem, 3) Setelah itu dilakukan pengambilan foto dan sidik jari secara digital, 4) Selanjutnya pengecekan kode aktivasi melalui email pribadi pengguna, 5) Tahap akhir adalah aktivasi oleh operator layanan, dan 6) Jika pengguna ingin KTP nya dicetak maka operator akan membantu, namun kalau ingin langsung digunakan melalui scan QR code di handphone tanpa dicetak juga tidak masalah asalkan memiliki kuota internet untuk mengaksesnya. (Sumber wawancara 11 Februari 2025).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Distrik Klamono dalam hal administrasi kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini sangat membantu. SIAK digunakan untuk mengelola data kependudukan seperti KTP, KK, KIA, Akte Kelahiran, Akte Nikah dan sudah bisa dicetak langsung di Aminduk Kios Kampung tentunya sesuai dengan persyaratan yang diminta.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menurut peneliti tahapan ini merupakan bagian daripada mencoba mengubah fenomena pelayanan birokrasi yang awalnya menunggu dan mengantri lama menjadi pelayanan yang efektif dan efisien jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama tapi juga mengeluarkan biaya transportasi ke Disdukcapil kabupaten untuk mendapatkan pelayanan, karena di Distrik Klamono pun sudah bisa dilayani.

Proses pengelolaan data penduduk berbasis online ini tentunya telah menggunakan sistem informasi dan teknologi pemerintahan. Berdasarkan wawancara peneliti bersama Kepala Seksi Administrasi Kependudukan bapak Robinton Sidabutar pada 11 Februari 2025, menyatakan bahwa:

Sistem yang digunakan ini telah terintegrasi langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sorong tapi juga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Terintegrasinya sistem ini membuat terciptanya koordinasi yang baik antar level instansi sehingga semua proses administrasi kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah distrik melalui aminduk kios kampung secara otomatis bisa diketahui oleh Dukcapil Kabupaten tapi juga Ditjen Dukcapil, jadi kedua instansi ini bisa mengetahui secara langsung dalam sehari berapa jumlah KTP,KIA,KK,dll yang dicetak oleh pemerintah Distrik Klamono. Kemudian, untuk sistem pengelolaan data penduduk di aminduk Kios Kampung menggunakan jaringan khusus yang bernama Very Small Aperature Terminal (VSAT) ini merupakan satelit yang terintegrasi dengan Dukcapil Kabupaten dan Ditjen Dukcapil yang berfungsi untuk

mengirim dan menerima data. Oleh sebab itu jika terjadi gangguan di pusat maka sampai ke daerah pun akan mengalami gangguan yang sama dalam proses pengelolaan data dengan teknologi pemerintahan. Jadi, yang menggunakan koneksi internet milik perusahaan swasta adalah aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). (Sumber wawancara 11 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menurut peneliti pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, di era transformasi seperti sekarang pemerintah mengharapkan masyarakat dapat berkembang melalui sistem pemerintahan berbasis online yang ada. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terjawab secara efektif dan efisien oleh pemerintah. Pada konteks ini, peran pemerintah berubah dari organisator menjadi fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi yang terbangun antara pemerintah Distrik Klamono dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sorong terkait pengelolaan data penduduk berbasis online melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Berdasarkan wawancara peneliti pada 11 Februari 2025 dengan Kepala Distrik Klamono, Bapak Oktofianus Kolin, S.Pd.K menyatakan bahwa;

Awal terjalannya kerjasama pemerintah Distrik Klamono dengan Disdukcapil Kabupaten adalah ketika saya melihat masyarakat saya harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk bisa sampai ke kabupaten demi untuk mendapatkan pelayanan administrasi di Disdukcapil Kabupaten Sorong. Seiring berjalannya waktu Disdukcapil mengadakan kegiatan pembuatan KTP,KIA, KK, Surat pindah, dll di Distrik Klamono, kegiatan berjalan lancar namun tidak semua masyarakat kebutuhannya terlayani. Melihat berkas-berkas yang menumpuk membuat timbulnya inspirasi untuk menjalin kerjasama dengan Disdukcapil dalam membangun pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) dengan nomor MoU 400.12-04 / 011 / 2024 Tentang Percepatan Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Program Kios Kampung. Setelah adanya koordinasi yang matang dengan Disdukcapil Kabupaten tapi juga Ditjen Dukcapil, pengajuan untuk pengadaan alat-alat pun disiapkan. Estimasi waktu persiapannya selama 4 bulan, sementara proses persiapan berlangsung staff distrik yang dipersiapkan sebagai operator layanan aminduk diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan di Disdukcapil Kabupaten Sorong. Setelah semua peralatan, tower jaringan dan bangunan tempat pelayanan yang dinamakan Aminduk Kios Kampung telah siap serta operator layanan pun telah selesai melakukan pelatihan, maka operasional pelayanan pada Aminduk Kios Kampung pun berlangsung. Hal serupa pun disampaikan oleh Sekretaris Distrik Klamono bapak Handri Amike "Komunikasi antara pemerintah Distrik Klamono bersama Disdukcapil terus dilakukan, sehingga masalah-masalah

yang terjadi dilapangan tentang SIAK dapat terakomodir, mengingat pelayanan Aminduk yang ada di Distrik tidak terlepas dari fungsi pengawasan Disdukcapil Kabupaten Sorong. Koordinasi ini penting untuk dilakukan terus menerus agar pelayanan yang baik ini terus ditingkatkan dan yang perlu diubah akan dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil evaluasi. (Sumber wawancara 31 Januari 2025)

Adapun penjelasan yang sama terkait koordinasi yang terbangun antar pemerintah distrik dan Disdukcapil berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Ibu Mey Roswati, S.AN pada 19 Februari 2025 menyatakan bahwa;

Sejauh ini kami dari Disdukcapil sudah membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah Distrik Klamono. Kios kampung ini dibuat sebagai perpanjangan tangan dari Disdukcapil agar masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Langkah pertama yang kami lakukan sembari mempersiapkan segala sesuatu untuk operasional kios kampung adalah dengan memberikan pelatihan kepada operator layanan yang akan menangani aminduk kios kampung. Sampai sejauh ini koordinasi yang terjalin cukup baik dan tidak ada hambatan yang terjadi, sebab koordinasi yang dilakukan tidak hanya dengan kepala distrik bersama staff jajaran tetapi kami juga berkoordinasi dengan kepala-kepala kampung sehingga jika ada masyarakat yang bertanya atau membutuhkan bantuan kami bisa langsung arahkan mereka ke kios kampung. Namun jika memang kebutuhan mereka tidak bisa terlayani di kios kampung akibat beberapa persyaratan yang tidak dimiliki, maka masyarakat akan diarahkan untuk ke Disdukcapil nanti kami yang akan mengambil kebijakan selanjutnya.(Sumber wawancara 19 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang terbangun antara pemerintah Distrik bersama Disdukcapil merupakan proses pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, sehingga bisa meningkatkan kualitas tata layanan publik. Menggunakan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan menghasilkan penerimaan informasi dan pengolahan data yang akurat serta efektif, bagian ini mengalir dalam infrastruktur e-government. Pada prinsip ini terdapat dua indikator penentu yaitu transparansi dan kemudahan akses informasi. Hasilnya adalah terdapat keterbukaan akses informasi kepada publik serta mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekertaris Distrik Klamono, bapak Handri Amike, SE pada 11 Februari 2025 memberikan pandangannya terkait program layanan SIAK terhadap jalannya tata kelola pemerintahan di Distrik Klamono menyatakan bahwa;

Kami pemerintah Distrik Klamono sampai sejauh ini sangat mengusahakan pendekatan pelayanan kepada masyarakat lewat berbagai program yang kami buat, salah satunya adalah dengan program pelayanan Aminduk ini. Program ini merupakan salah satu langkah percepatan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada. Yang mana walaupun letak Distrik Klamono ini jauh dari pusat keramaian kota, namun pendekatan pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan terbaik yang tentunya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Pemanfaatannya untuk digitalisasi ini sangat baik dalam mendukung jalannya pelayanan pemerintahan, kesehatan, ekonomi, dll. Program ini sangat memberikan dampak baik bagi masyarakat Distrik Klamono yang sudah mendapatkan layanan ini. Tugas kami selanjutnya adalah mengsosialisasikan bagian ini kepada masyarakat yang belum paham teknologi. (Sumber wawancara 11 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menurut peneliti program layanan SIAK memberikan dampak baik kepada masyarakat. Karena lewat layanan ini segala proses administrasi kependudukan dapat terorganisir dengan baik sehingga pengelolaan pemerintahan pun dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi letak geografis yang jauh dari pusat kota tidak menjadi penghambat untuk pemerintahan bergerak maju dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

### 3. Manfaat

Berdasarkan hasil wawancara diatas menurut peneliti Semua penjelasan dari pemerintah distrik dan Disdukcapil selaku penyenggara telah disampaikan, berikut adalah yang disampaikan oleh penerima manfaat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bapak Jefry pada 11 Februari 2025, mengatakan ;

Program layanan ini lebih mudah dibanding kami masyarakat harus turun langsung ke capil untuk mengurus semua berkas-berkas administrasi. Kami merasa sangat terbantu karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk sampai ke Disdukcapil cukup di Distrik saja sudah bisa dilayani. Kami pun berharap proses pengurusan penyelesaian hak ulayat cepat terselesaikan agar pelayanan aminduk kios kampung kembali berjalan seperti biasa untuk melayani kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat dan semua pelayanan yang mungkin masih kurang bisa lebih ditingkatkan. Terakhir saran saya adalah layanan digital ini dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, termasuk bagi yang belum terbiasa dengan teknologi. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan pelatihan dasar penggunaan teknologi digital dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat layanan SIAK tapi juga IKD. (Sumber wawancara 11 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menurut peneliti program layanan ini sangat

baik karena masyarakat mendapatkan manfaat besar. Pelayanan ini membuat masyarakat menjadi mudah untuk mendapatkan akses dalam pengurusan dokumen, meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian data atau pemalsuan dokumen, dll. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

### **Kendala-Kendala Dalam Proses Implementasi Pengelolaan Data Penduduk Berbasis Online Melalui Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Distrik Klamono**

Implementasi pengelolaan data penduduk berbasis online di Distrik Klamono melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini tentunya banyak kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama operator layanan ibu Misriana pada 11 Februari 2025 menyatakan bahwa :

Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis online tentunya tidak mudah untuk bisa berjalan sempurna dan pasti ada kendala-kendala signifikan yang terjadi di lapangan, terkhususnya yang dihadapi oleh kami selaku operator layanan, diantaranya : 1) Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala jika kami menemukan masyarakat yang tidak memiliki handphone android adalah dengan menyarankan orang tersebut untuk meminjam handphone android di kerabatnya, 2) Pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap teknologi digital membuat kami harus menjelaskan secara terperinci lagi kepada orang tersebut. Langkah yang kami lakukan adalah dengan memberikan sosialisasi lebih lanjut terkait manfaat SIAK dalam penggunaan aplikasi IKD, agar masyarakat tertarik dan memberi diri untuk menerima perkembangan teknologi digital terkhususnya dalam aspek pemerintahan, 3) Langkah yang diambil jika gangguan jaringan yang terpusat pada sistem adalah biasanya kami menunggu untuk melihat durasi waktunya, jika lebih dari 3 jam maka pelayanan kami tutup nanti dilanjutkan pada esok hari kalau jaringan sudah stabil. Namun, kalau kurang dari 3 jam maka masyarakat akan kami suruh tunggu untuk pelayanan dapat dilanjutkan, 4) Jika tinta untuk mencetak KTP habis, langkah awal yang kami lakukan adalah menjalin komunikasi dengan Disdukcapil untuk menanyakan kesediaan stok reborn/tinta, selanjutnya kalau ada maka kami meminta masyarakat untuk menunggu sebentar dan salah satu dari staff distrik akan mengambilnya di Disdukcapil, ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. (Sumber wawancara 11 Februari 2025)

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Distrik Klamono, bapak Oktofianus Kolin, S.Pd.K sesuai wawancara pada 11 Februari 2025 terkait langkah-langkah yang dilakukan dengan melihat sebuah permasalahan yang saat ini terjadi.

Pendekatan pelayanan yang saat ini kami pemerintah Distrik Klamono usahakan adalah pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital. Disamping itu tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat juga kami lakukan. Berbagai koordinasi dengan instansi-

instansi di kalangan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama juga telah dilakukan. Namun semuanya terhambat karena kantor distrik dipalang, ini membuat inovasi pelayanan juga harus tertunda. Sampai sejauh ini saya sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sorong untuk segera membantu kami dalam menyelesaikan masalah ini agar semua pelayanan boleh dapat kembali berjalan seperti biasanya. Pertemuan bersama pemilik hak ulayat juga telah dilakukan dan telah menghasilkan kesepakatan yang harus diselesaikan, akan tetapi mereka tetap tidak mau untuk memberikan ijin penggunaan kantor sampai mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Sebagai pemimpin kebijakan yang bisa saya ambil sementara adalah mengalihkan aktivitas kantor ke tempat sementara yang sudah disepakati walaupun pada akhirnya belum semua pelayanan dapat terlaksana. (Sumber wawancara 11 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan sampai sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Distrik Klamono dalam menanggulangi kendala-kendala yang terjadi adalah langkah yang tepat agar bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Implementasi tata kelola pemerintahan berbasis online pada akhirnya dapat dimaknai sebagai pembawa perubahan dalam tatanan pemerintahan yang menggunakan system digitalisasi/komputerisasi. Jika dilihat dalam skala pemerintahan daerah sudah banyak implementasi tata kelola pemerintahan berbasis online yang sudah berjalan, contohnya: pengeloan data penduduk melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan menghasilkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk itu dengan memanfaatkan teknologi digital pemerintah Distrik Klamono melakukan kerjasama dengan Disdukcapil dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan.

Koordinasi yang dilakukan menghasilkan terciptanya Aminduk Kios Kampung, kios kampung ini melayani segala proses administrasi kependudukan seperti KTP, KIA, KK, Akte Kelahiran, Akte Nikah, dll. Segala proses administrasi kependudukan dilayani dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pelayanan menggunakan SIAK ini bertujuan untuk mengelola data penduduk yang berbasis online agar dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan. Dengan memanfaatkan sistem ini di Distrik Klamono masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk pergi ke Disdukcapil karena kebutuhan layanan administrasi sudah bisa terjawab di Distrik Klamono. Manfaat lain yang didapatkan dari penggunaan SIAK adalah hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di

bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

## REFERENSI

Abdul Wahab S, 2016, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik*, 4th edition Bumi Aksara, Jakarta

Buku Panduan *Penyelenggaraan situs Pemerintah Daerah*, Depkominfo, 2003

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong. (2024). *DISTRİK KLAMONO dalamangka2024*.  
<https://sorongkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/f4d3a29cc74f74e48296e174/distrik-klamono-dalam-angka-2023.html> (diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 19:00 dan 22 Februari 2025)

DATA BASE PERATURAN. (n.d.). *JDIH BPK RI*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018> (diakses pada tanggal 21 November 2024 pukul 14:00)

Hetifah Sj. Sumarto. (2009). *Inovasi, partisipasi dan good governance 20 prakarsa inovatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kerangka Arsitektur E-Government

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kelibay, I. (2020). *Sumber Daya Manusia Sebagai Transformasi Electronic Government*. Progresif-Lamongan.

Kusuma Dewi D S, 2022, *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*, 1st edition Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta

Lancaster, C. (1993). *Governance and Development: the Views From Washington*. IDS Bulletin, 24(1), 9–15. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.1993.mp24001003.x>

Moenek, R., & Dadang, S. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT REMAJA ROSDAKARYA.

Pramono J, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 1st edition UNISRI Press, Solo

Penggunaan teknologi informasi (Rachmatullah & Purwani, 2022, p. 14)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi

## Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Pasal 2d Tentang Good Governance

Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). *Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government*. Jurnal Fasilkom, 12(1), 14–19. <https://doi.org/10.37859/jf.v12i1.3512>

Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. Jurnal EQUILIBRIUM.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian (1st ed.)*. Literasi Media Publishing.

Stefanus Arwandi Jai, Dody Setyawan, I. A. (2016). *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 34.

Sugiono (2015:2). (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono*. Mode Penelitian Kualitatif.

Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). *Bab III metode penelitian*. Suparyanto Dan Rosad (2015). [http://repository.unpas.ac.id/37223/3/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/37223/3/BAB%20III.pdf)

Ulfatihah, H. (2020). *IMPLEMENTASI TABUNGAN BAITULLAH iB HASANAH DAN VARIASI AKAD PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik